

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang Islam dalam hubungan internasional dewasa ini lebih sering menempatkan Islam dalam stigma yang negatif, semisal ketika Islam diasosiasikan dengan gerakan radikal, terorisme, anti modernisasi dan lain sebagainya. Seperti halnya yang terjadi di Asia Tenggara Islam begitu melekat dengan persoalan konfliktual seperti Islam di Thailand Selatan, Islam di Mindanao atau bahkan di Indonesia yang beberapa di antaranya di duga dekat dengan gerakan radikal.

Jika kita melihat pada kasus di negara negara Asia Tenggara yang lain, Islam menjadi salah satu faktor dalam dinamika politik. Terdapat beberapa persoalan dengan Islam misalnya di Indonesia, Thailand, Filipina maupun Myanmar. Kasus yang paling hangat adalah minoritas Rohingya di Myanmar. Rohingya adalah sebuah suku minoritas yang identik dengan Islam di Myanmar (Singh: 2013). Mereka berasal dari Bangladesh dan telah lama bermukim di Myanmar. Oleh Junta militer Rohingnya, keberadaan mereka tidak diakui sebagai bagian dari Myanmar sehingga terjadi pengusiran dan pembunuhan.

Selain di Myanmar, dinamika Islam dalam dalam politik juga terjadi di Thailand dengan masalah utama yakni disharmoni hubungan antara pemerintah dengan masyarakat di Thailand Selatan. Salah satu puncak dari konflik tersebut misalnya adalah konflik bersenjata antara tentara pemerintah

melawan pemberontak Pattani yang menewaskan 3.500 orang.(Mullins:2009)

Di Filipina, Islam menjadi isu politik yang panjang dan seolah tiada akhir. Bangsa Moro yang berada di Mindanao (bagian Selatan dari Filipina) merasa menjadi bangsa yang berbeda secara etnis dengan bangsa pada umumnya di Filipina Tengah dan Utara. Upaya pemisahan diri Bangsa Moro menjadi problem integrasi negara itu. Berbagai upaya damai maupun militer telah dilakukan, meskipun tanda-tanda akhir dari konflik itu masih belum terlihat jelas.(Ringuet:2002)

Salah satu komunitas Muslim di Asia Tenggara yang signifikan berada di Singapura. Singapura adalah Negara kota, yang didominasi oleh Etnis Cina. Islam di Singapura identik dengan Etnis Melayu, karena 99,6% Melayu beragama Islam (Eng: 2008). Islam/Melayu merupakan kelompok minoritas di sebuah negara yang sekuler dan multikultural. Kelompok mayoritas adalah Etnis Cina dengan 74,1%, Melayu 13.4%, India 9,2%, sementara etnis lain 3.3% (Helmiati: 2013). Apabila dilihat dari komposisi agama, maka Budha adalah yang terbesar disusul Kristen, Hindu, dan Islam.

Posisi minoritas kaum Islam Melayu, juga menjadi kelompok yang marjinal, tidak terbatas pada persoalan demografi, namun juga menyentuh pada aspek sosial, ekonomi dan politik. Pertama adalah keterbelakangan ekonomi. Karakteristik Melayu yang mempunyai etos kerja lebih rendah, berakibat pada pendapatan ekonomi yang rendah dan memosisikan mereka sebagai kelompok yang miskin. Bahkan menurut wan Hussin Zoohri, kemiskinan tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga miskin dalam banyak hal. Mengutip karya Zainal Abidin bin Ahmad,

kemiskinan Melayu di Singapura meliputi banyak hal. Menurutnya, *The Malays, as a whole, are particularly poor people.....Poverty is their most outstanding characteristic and their greatest handicap in the race progress. Poor in money, poor in education poor in intellectual equipments and moral qualities...* (Zoothri: 1987)

Suriani Suratman menggambarkan ketertinggalan Melayu (Malay Backwards) dalam beberapa fase. Misalnya pada dekade 60an Melayu sangat lamban untuk beradaptasi dengan perubahan. Fase kedua yakni pada decade 70an Melayu masih bergaya lama dan tradisional. Mereka harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Fase ketiga adalah tahun 80an di mana karakteristik Melayu digambarkan sebagai masih tertinggal di belakang dan sulit berintegrasi. Fase 90an ditandai dengan sedikit perubahan, di mana Melayu mulai mengalami perkembangan tetapi masih belum memuaskan. Fase tahun 2000an Melayu mengalami kemajuan tetapi mereka menjaga jarak dengan komunitas lainnya. (Suratman: 2015)

Sementara itu, Lily Zubaidah Rahim menggambarkan dengan jelas tentang marginalitas Melayu dalam arena politik dan pendidikan yang saling berkelindan. Menurutnya faktor sejarah, ideologi dan institusional menyumbang kontribusi akan keterbelakangan pendidikan. Di antaranya adalah kebijakan tentang privatisasi sekolah sekolah unggulan, atau kenaikan biaya sekolah yang sulit dijangkau oleh kelompok Melayu (Rahim: 1998).

Dalam dimensi politik, dinamika politik dan pemerintahan Singapura dikuasai (didominasi) oleh kelompok mayoritas yakni Cina. Etnis Cina menguasai semua posisi

strategis dalam pemerintahan, dengan kendaraan politik berupa Partai Tindakan Rakyat (*People's Action Party/PAP*). Semenjak didirikan Oleh Lee Kuan Yew, Partai ini menjadi komponen paling kuat dalam perpolitikan di Singapura. Dominasi Partai Tindakan Rakyat dalam parlemen juga diikuti oleh peran strategis etnis Cina dan India dalam jabatan jabatan strategis. Selain menempati Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri Etnis Cina juga menguasai berbagai sektor Kementerian Ekonomi, Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Luar Negeri.

Singapura juga mentasbihkan dirinya menjadi negara yang sekuler dan sekaligus negara yang otoriter sebagaimana perspektif dari Human Right Watch bahwa Singapura sangat membatasi warganya untuk mengekspresikan kebebasannya. (Rahim:2009). Hal ini amat berbeda dengan kebanyakan negara negara di Asia Tenggara. Di Malaysia misalnya nafas Islam sangat kental, begitu juga di Indonesia dengan kehidupan keagamaan yang dinamis.

Meskipun Muslim Melayu menjadi kaum minoritas di Singapura, eksistensi nilai nilai keislaman justru mendapatkan semacam jaminan dari pemerintah Singapura. Terdapat berbagai kebijakan pemerintah Singapura yang akomodatif terhadap kepentingan kelompok Islam. Misalnya saja adalah penggunaan atribut identitas Melayu (Islam) menjadi simbol dari Singapura seperti Konstitusi, bahasa nasional maupun lagu kebangsaan. Pasal 152 Konstitusi Singapura menegaskan posisi minoritas dan Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk memberikan jaminan perlindungan atas kelestariannya.

Article 152 Minorities and Special Position of Malays

(1) It shall be the responsibility of the Government constantly to care for the interests of the racial and religious minorities in Singapore.

(2) The Government shall exercise its functions in such manner as to recognize the special position Malays, who are the indigenous people of Singapore, and accordingly it shall be the responsibility of Government to protect, safeguard, support, foster and promote their political, educational, religious, economic, social and cultural interests and the Malay language (Singapore's Constitution 1965)

Selain itu, terdapat beberapa kebijakan yang sangat ramah terhadap posisi Islam. Pada tahun 1966, pemerintah mengeluarkan undang-undang Administration of Muslim Law Act (AMLA), yang mengatur tentang pemberlakuan hukum Islam bagi pemeluknya. Salah satu realisasi dari kebijakan tersebut adalah didirikannya lembaga Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), yang memberikan fasilitas kepada Muslim tentang pelaksanaan zakat, haji, peribadatan dan wakaf.

Pendirian MUIS ini juga merupakan sarana menjamin eksistensi Islam di Singapura dengan kewajiban negara untuk mendirikan Masjid dan segenap fasilitasnya, serta memperbolehkan sekolah sekolah Islam sebagai berkembang di Singapura. Sebagai catatan, di Singapura masih terdapat beberapa Madrasah seperti Madrasah Wak Tanjung, Al Irsyad, Al Junied, Al Iqbal dan Al Ma'arif yang menggunakan metode dan konten pengajaran Islam seperti pembelajaran tentang Al Qur'an dan AL Hadits.(Aljunied: 2005).

Dalam ranah sosial, pemerintah Singapura juga masih memperbolehkan berkembangnya organisasi sosial keagamaan seperti MENDAKI, PERGAS, PERTAPIS, Muhammadiyah, yang mampu menghimpun kekuatan sosial dan mampu menyuarakan kepentingan kelompok mereka, misalnya dalam isu tertentu seperti homoseksualitas, ataupun isu tudung (Eng: 2008)

Bahkan pada tahun 2006, muncul juga kebijakan yang memperbolehkan dan mendorong beroperasinya ekonomi berbasis syari'ah Islam dengan keluarnya kebijakan mengenai perbankan Islam.. Kebijakan ini dinilai selangkah lebih maju daripada praktik tentang perbankan Islam di Malaysia maupun Indonesia. (Triyanta: 2010) Artinya, pada era pasca Lee Kuan Yew nampaknya terdapat persamaan pola kebijakan yang akomodatif terhadap Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Pasca kemerdekaan 1965, kelompok Melayu (Islam) di Singapura merupakan kelompok minoritas dan berada dalam posisi marginal dalam persoalan ekonomi, politik dan sosial. Sementara Cina merupakan kelompok mayoritas yang menguasai panggung politik maupun ekonomi. Menariknya adalah, hadirnya berbagai kebijakan yang mengakomodasi nilai Islam. Oleh karenanya, penelitian ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Mengapa kebijakan Pemerintah Singapura lebih akomodatif dengan nilai Islam?

1.3 Definisi Konseptual

Penelitian ini memfokuskan pada Islam sebagai sebuah obyek kajian. Yang perlu digarisbawahi pada penelitian ini adalah konsepsi tentang Islam, karena ia mempunyai beberapa pengertian yakni sebagai sebuah ideologi dan ajaran (*thought*) dan sebagai sebuah komunitas atau sekelompok orang yang beragama Islam.

Dalam penelitian ini Islam yang dimaksud adalah komunitas atau sekelompok orang yang beragama Islam yang mempunyai hubungan satu sama lain, atau saling terkait. Di Singapura, kelompok Islam identik dengan etnis Melayu dan oleh karenanya, penyebutan Islam pada konteks Singapura sering berkonotasi Melayu, demikian juga sebaliknya. Hal ini terjadi mengingat 99% etnis Melayu beragama Islam dan sangat kecil di antara mereka yang beragama non Islam. Meski demikian tidak sedikit etnis non Melayu yang beragama Islam.

Beberapa argumen yang menguatkan pendapat ini antara lain dari Haikal dan Yahaya. Menurutnya *It is made up of Malays, Indians, Arabs, Chinese, and other ethnic group. According to 1990 census, part of the 0.3 percent (categorized as other religions) of the Chinese community , 99.6% of the Malay community , 27%.0 percent of the Indian community, and 24.7 percent of Other Ethnic Group were recorded as Muslims* (Haikal & Yahaya: 1996, 435).

Selain itu, Khaerudin Aljuneid mempertegas bahwa Muslim di Singapura identik dengan Melayu. Menurutnya, *Annual reports of the colonial administration of Singapore for the years 1947 through 1957 claimed that an 'enumeration of*

religions has not been made and is indeed scarcely possible'. Out of an estimated figure of more than 100,000 persons, the Malays 'are almost without exception Muslim (Aljunied: 2009, 9). Artinya, Islam identik dengan Melayu, begitu pula Melayu identik dengan Islam. Oleh karenanya penyebutan Melayu merepresentasikan Islam.

Pada konteks yang lain, Islam berarti pula kelompok Islam dalam cakupan lebih luas yakni berupa negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Pada konteks penelitian ini, representasi Islam dalam cakupan yang lebih luas diwakili oleh Indonesia dan Malaysia.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui lebih mendalam tentang posisi minoritas Muslim Singapura dalam konstelasi sosial politik.
- 2) Mengeksplorasi pengaruh kaum minoritas Muslim dalam dinamika politik di Singapura.
- 3) Menemukan faktor faktor penyebab dari kebijakan Lee Kuan Yew yang cenderung mengakomodasi kepentingan Muslim.
- 4) Menemukan perspektif baru dalam memahami dinamika politik Singapura yang selama ini didominasi oleh pendekatan realis.

1.5 Kerangka Teoritik

Dalam negara yang otoriter atau semi otoriter, kebijakan negara berpusat pada elit politik negara tersebut. Segolongan

kecil orang yang berkuasa atau elit tersebut memonopoli akses untuk membuat kebijakan. Sudah barang tentu kebijakan tersebut sangat berpretensi pada pemberian keuntungan bagi penguasa. Singapura adalah salah satu negara yang semi otoriter di mana kebijakan negara tersebut sangat ditentukan oleh pemimpinnya dalam hal ini adalah perdana menteri. Kebijakan politik negara, dengan demikian ditentukan oleh persepsi pemimpinnya tentang lingkungan sekitar. Oleh karenanya dalam penelitian ini akan digunakan teori antara lain, persepsi, ideosinkretisme dan konstruktivisme.

1. Teori persepsi

Menurut Ole R Holsti, keputusan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh persepsi dari aktor pengambil keputusan (*decisison maker*) tentang fakta yang dilihat dan nilai yang di anut oleh pembuat keputusan. Menurutnya, keputusan luar negeri adalah hasil dari persepsi para pembuat keputusan di mana persepsi juga sangat dipengaruhi oleh sistem nilai dan keyakinan para pembuat keputusan serta citra (*image*) tentang apa yang seharusnya terjadi (Mas' oed: 1989).

Dalam sebuah negara kecil yang semi otoritarian, peran pemimpin dalam menentukan kebijakan sangat besar. Bisa jadi keputusan yang dibuat merupakan hasil kerja pemikiran pemimpin, yang tidak terlalu menghiraukan peran lembaga atau organ lain dalam struktur kepemimpinan negara. Hierarki kekuasaan justru mempunyai andil terbesar dalam akselerasi pembuatan keputusan, di mana struktur di bawah akan mengikuti apa yang diputuskan oleh struktur di atasnya.

Apa yang diputuskan oleh pemimpin, dipengaruhi oleh persepsi pemimpin tentang fakta yang dihadapinya. Dalam

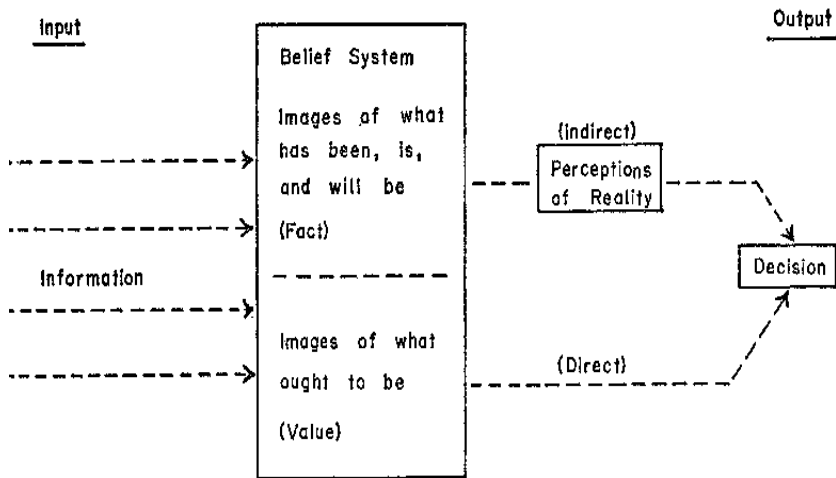
kaitan ini Robert Jervis menambahkan bahwa *the tendency toward perception makes leaders interpret their own decision as responses the objectives conditions, while attributing the action of foreign rivals to a hostile disposition* (Dougherty & Pfalgraft: 2001, 555). Pemimpin mempunyai otoritas dan logika tersendiri dalam menafsir situasi dan menerjemahkannya dalam kebijakan-kebijakan.

Menjadi penting untuk melihat alur dari persepsi ini untuk kemudian dikonversi menjadi sebuah kebijakan. Menurut Holsti, *decision makers act upon their definition of the situation and their images of states –others as well as their own. These image are in turn dependent upon the decision maker's belief system, and these may or may not be accurate representation of reality* (Holsti: 1962, 244). Peran para pembuat keputusan luar negeri, sangat dipengaruhi oleh persepsinya tentang situasi dan keadaan, meskipun persepsi atau penilaian tersebut belum tentu akurat.

Holsti memperjelas tentang kerangka kerja sebagai berikut:

Diagram 1.1

Hubungan antara sistem keyakinan dan pembuatan keputusan



Sumber : Ole R Holsti, The Belief System and National Images : A Case Study”, dalam *Conflict Resolution* Volume VI, Number 3, 1962. Hal 244

Terdapat tiga komponen yang menentukan keputusan dalam hal ini, yakni, pertama, sistem keyakinan meliputi citra tentang apa yang telah, sedang dan akan terjadi, kedua, citra tentang bagaimana sesuatu itu seharusnya terjadi, dan ketiga persepsi tentang realitas. Pencitraan seseorang atas apa yang telah, sedang dan akan terjadi akan memunculkan persepsi seseorang tentang realitas, dan inilah yang pada akhirnya dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang akan di ambil.

2. Ideosinkretisme

Untuk lebih memperdalam kajian ini, maka digunakan teori tentang ideosinkretisme (Anugerah: 2016, 5-16), yakni hal-hal yang mempengaruhi pandangan seseorang tentang dunia yang

meliputi keluarga, pendidikan, pengalaman pribadi, dan lingkungan sekitar. Ideosinkretisme diartikan sebagai persepsi elit yang menjadi fondasi keputusan yang akan dibuatnya. Dengan kata lain, keputusan tidak dibuat di ruang hampa, tetapi ia terkait pada apa yang melatarbelakanginya. Sebagai contoh misalnya adalah konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang akomodatif. Sementara politik yang otoriter akan menghasilkan hukum yang konservatif. (Kamsi: 2017)

Menurut Anugerah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi elit tentang situasi sosial politik. Pertama adalah latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga mencakup status sosial dan ekonomi keluarga, dan hubungan sosial keluarga tersebut dengan masyarakat lain. Hal lain yang berpengaruh di sini adalah situasi hubungan keluarga tersebut.

Kedua adalah Latar belakang pendidikan. Pendidikan memberikan kontribusi tidak sekedar pada pemikiran seseorang tetapi juga pada cara hidup seseorang. Seseorang yang berpendidikan rendah dan berpendidikan tinggi pastilah mempunyai cara pandang yang berbeda tentang dunia. Perlu digarisbawahi bahwa terdapat juga faktor “*school*” yang berlaku dalam dunia pendidikan tersebut yang berpengaruh pada pola pikir seseorang. Pendidikan tidak sekedar menyangkut pada masalah pendidikan formal, namun juga pendidikan non formal seperti buku bacaan maupun teman diskusi.

Faktor ketiga adalah pengalaman dan pembelajaran. *Experience* atau pengalaman mampu membentuk watak seseorang. Setiap orang mempunyai pengalaman yang

berbeda, dan pengalaman tersebut memberikan spektrum gaya berpikir seseorang. Misalnya saja ketika masa kecil seseorang diperlakukan secara tidak baik oleh ayahnya, besar kemungkinan ketika beranjak dewasa ia akan membenci seorang ayah. Ini disebabkan oleh cara berpikir anak tersebut yang berdasar pada pengalaman pahitnya. Seorang mahasiswa yang aktif mengikuti gerakan para aktivis yang lain, akan mempunyai cara yang berbeda dengan mereka yang hanya berkatat pada buku dalam menyikapi realitas sosial di lingkungannya.

Keempat, adalah afiliasi elit atau pemimpin. Dalam sebuah sistem politik yang menjunjung tinggi norma demokrasi, persepsi seseorang sangat ditentukan oleh ideologi partai di mana ia berafiliasi. Para presiden Amerika Serikat dari Partai Republik akan mempunyai kebijakan luar negeri yang berbeda dengan presiden yang berasal dari Partai Demokrat. Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh garis besar partai tempat mereka berafiliasi. Partai Republik lebih cenderung menggunakan opsi militer dalam kebijakan luar negerinya, sedangkan partai Demokrat cenderung untuk mengusung isu hak asasi manusia.

3. Konstruktivisme

Teori konstruktivisme merupakan bagian dari teori teori kritis yang ingin memberikan alternative dari dua kutub perdebatan teori politik antar bangsa yakni realism dan liberalism. Teori-teori konstruktifisme mempunyai pendekatan yang berbeda dengan dua teori klasik sebelumnya yang menekankan pada pentingnya dunia material (kekuasaan). Sebaliknya, teori konstruktifisme lebih menekankan pada dunia ideasional, yakni bagaimana ide

mengkonstruksi realitas. Dunia sosial sosial bukan merupakan sesuatu yang *given*, tetapi merupakan wilayah intersubjektif. Ia adalah hasil dari bagaimana komunitas sosialnya memberikan pemaknaan. *The social world is not a given: it is not something 'out there' whose law can be discovered by scientific research and explained by scientific theory, as behavioral and positivists argue. Rather, it is an intersubjective domain: it is meaningful to the people who made it and live in it, and who who understand it. It has been made or constituted by people at particular time and place.* (Jacson & Sorensen” 1999).

Asumsi dasar dari teori konstruktivisme yakni pertama, dunia ideasional mempunyai posisi dan peran yang sama dengan struktur sosial. Dunia ideasional dapat berupa pengetahuan, harapan, norma dan pemahaman bersama atas suatu realitas. Norma atau nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat yang menyediakan ukuran mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh, sangat menentukan tentang pemahaman masyarakat tersebut terhadap suatu hal. Kedua, pentingnya suatu identitas aktor, karena identitas akan sangat menentukan perilaku. Kepentingan aktor dengan demikian tidak selamanya dikendalikan oleh kepentingan semata (sebagaimana teori klasik), tetapi juga dikendalikan oleh identitasnya.

Sebagai misal tentang kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara dan Inggris. Data menunjukkan bahwa Inggris mempunyai senjata yang lebih banyak dari pada Korea Utara. Tetapi bagi Amerika Serikat, kepemilikan senjata nuklir Inggris yang banyak tidak merupakan ancaman bagi Amerika Serikat, sebaliknya kepemilikan senjata nuklir yang tidak

banyak oleh Korea Utara dinilai sebagai sebuah ancaman oleh Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena ada peran norma dan identitas yang mengkonstruksi realitas. Inggris dan Amerika mempunyai identitas yang hampir sama sebagai negara demokrasi. Sebaliknya terhadap Korea Utara tentulah mempunyai identitas yang sangat berbeda mengingat Korea Utara dikuasai oleh rezim otoriter.

Atau contoh lain misalnya tentang pandangan yang berbeda antara teori klasik dan teori konstruktifis. Menurut teori teori klasik, berakhirnya Perang Dingin disebabkan oleh kalahnya salah satu blok yakni Blok Timur. Kolapsnya Uni Soviet menjadikan ketimpangan kekuatan antar blok dan dengan demikian perang pun dinyatakan usai. Namun bagi kalangan konstruktivisme, Perang Dingin berakhir karena terjadi perubahan identitas di salah satu blok. Negara negara di Blok Timur satu per satu berubah dari rezim komunis ke arah rezim liberal yang lebih demokratis. Perubahan identitas ini yang mengantarkan pada konstruksi bahwa blok Timur mempunyai identitas yang hampir sama dengan Blok Barat sehingga tidak terjadi permusuhan antar keduanya.

Sebagai rezim yang semi otoriter, kepemimpinan Singapura sangat tergantung kepada sosok Perdana Menteri yakni Lee Kuan Yew. Posisinya dalam pembuatan kebijakan luar negeri semakin sentral mengingat Lee Kuan Yew adalah pendiri Singapura, pendiri Partai yang paling berkuasa (Partai Tindakan Rakyat) serta pimpinan tertinggi dalam pemerintahan. Dominasi Partai Tindakan Rakyat dalam parlemen mengakibatkan lemahnya kontrol dan oposisi terhadap kepemimpinan Lee Kuan Yew.

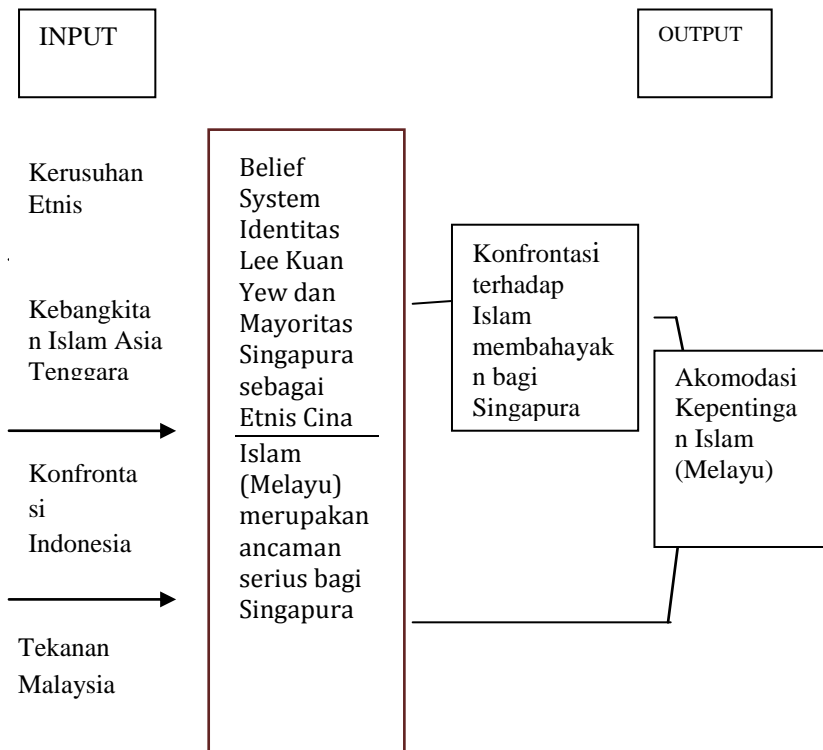
Dengan menggunakan kaca mata atas paparan teoretis sebelumnya, keputusan Lee Kuan Yew tentang politik luar negerinya, terutama terhadap Islam atau lawan dari Islam, dipengaruhi oleh pencitraannya tentang apa yang telah dan sedang terjadi pada proses politik yang ia jalani. Pengalaman sejarahnya tentang Islam (kelompok Muslim) telah memberinya citra sedemikian rupa tentang Islam. Pencitraan ini pada akhirnya membentuk persepsi tentang realitas, yakni bagaimana Lee Kuan Yew menafsirkan realitas melalui pengalaman sejarahnya.

Berdasar pada pengalamannya, Lee Kuan Yew pernah mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman ketika dituduh oleh Tunku Abdul Rahman bahwa dirinya berambisi menjadi Perdana Menteri. Ia juga merasakan betapa perlakuan Malaysia tidak konsisten terhadap Singapura yang memintanya bergabung dengan Federasi Malaysia, namun akhirnya menggiring kepada pemisahan. Beberapa kerusuhan yang terjadi yang memolakan pertikaian Muslim melawan Non Muslim setelah insiden Maria Hertogh dan kerusuhan rasial pasca pemilu di awal sejarah Singapura memberikan citra bahwa Islam cenderung menggunakan sentimen agama atas ketidakmampuannya bersaing dengan etnis yang lain. Demikian halnya dengan Indonesia yang mempunyai kebijakan mirip dengan Malaysia. Soekarno adalah pihak yang mendukung pernikahan Mansoor dan Maria Hertogh sebagai protes atas kebijakan koloni Inggris. Secara khusus, Indonesia mempunyai stigma buruk ketika terlibat dalam kebijakan luar negeri Ganyang Malaysia.

Citra ini pada akhirnya akan menjadikan persepsi bahwa Islam memang mempunyai kecenderungan mengancam

daripada menjadi pendukung atas Singapura. Apalagi hal ini didukung oleh kecenderungan Islam di Asia Tenggara yang cenderung mengalami kebangkitan. Dan oleh karenanya, sikap menentang keduanya tentu saja akan membawa dampak yang buruk terhadap Singapura. Sebaliknya, sikap yang akomodatif terhadap Islam harus dikembangkan demi memoderasi tekanan atau ancaman yang mungkin datang. Moderasi itu misalnya adalah dengan cara mengakomodasikan kepentingan Islam termasuk mereka yang berada di dalam negeri Singapura dengan kebijakan-kebijakan yang pro Islam

Diagram. 1.2
Aplikasi Teori Persepsi Holsti



1.6 Metode Penelitian

1) Metode

Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai teknik penelitian yang intuitif dan sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dan cara-cara lain dari kuantifikasi. Lebih lanjut lagi penelitian kualitatif adalah penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren. Penelitian kualitatif juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemahaman (*understanding*) (Bakri: 2016).

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tentang dunia di sekitar kita, sehingga menuntut peneliti untuk memberikan fokus pada makna dan proses yang membentuk fenomena sosial. Oleh karenanya penelitian kualitatif dilakukan melalui studi mendalam atas suatu fenomena sosial dari suatu daerah, kelompok, atau individu tertentu. Metode kualitatif yang dimaksudkan adalah untuk menggambarkan beragam alat dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data dan menganalisanya yang datang dalam bentuk bahasa lisan atau tertulis yang tidak diformalkan menjadi angka (Bakri: 2016, 62).

Metode ini sering mengandalkan pendekatan induktif, yang menganalisa berbagai fakta dan kejadian yang bersifat spesifik atau khusus untuk mencari kesimpulan atau pola yang umum. Dalam penelitian ini, akan dicari tentang berbagai

kejadian, fakta, dan kebijakan yang bersifat khusus, untuk ditarik kesimpulan yang lebih umum.

2) Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah. Argumennya adalah ketika sebuah kebijakan luar negeri diproses (dirancang, diformulasikan dan dieksekusi), ia akan dipengaruhi oleh lingkungan situasional yang berlangsung dan oleh para pembuat kebijakan. Merujuk kepada teori tentang ideosinkretisme bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh latar belakang seorang pembuat keputusan termasuk pengalamannya, maka menjadi penting untuk menggali tentang sejarah tersebut. Sejarah yang terjadi di sekitar para pembuat kebijakan dapat dijadikan rujukan mengenai kebijakan yang dibuatnya

3) Teknik Pengumpulan Data

Metode kualitatif merujuk pada pengumpulan data dan strategi atau teknis analisis data-data *non numeric* (Bakri: 2016, 62). Data-data tersebut dapat berbentuk dokumen primer, yakni dokumen yang asli (*original*) yang ditulis oleh individu yang mempunyai akses langsung ke informasi yang digambarkan, atau mereka yang langsung mengalami peristiwa tersebut. Dokumen juga dapat berbentuk dokumen sekunder, yakni dokumen yang mengacu pada dokumen primer, yaitu dokumen yang diperoleh oleh individu yang tidak hadir dalam suatu kejadian, tetapi menerima informasi dengan mewawancarai saksi mata atau dengan membaca dokumen primer. Sebagai misal jika peneliti dalam hal ini tentang Singapura mewawancarai langsung terhadap pejabat maka data tersebut adalah data primer. Jika kita mendapatkan

data tersebut dari media masa misalnya, maka itu adalah data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diambil dari lapangan oleh si peneliti. Data primer belum terpublikasi dalam berbagai media. Data primer dapat berupa hasil pengamatan langsung, penyebaran angket, maupun *interview*. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, peneliti merasa perlu untuk tinggal di area penelitian, terutama tinggal bersama kaum Muslim Melayu sebagai kelompok minoritas.

Tujuan penggunaan metode *interview* ini adalah untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, keyakinan dan motivasi individu mengenai suatu hal. Metode wawancara diyakini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial daripada menggunakan kuesioner dalam penelitian. Metode wawancara juga memungkinkan penggalian terhadap isu-isu yang bersifat sensitive di mana seringkali responden sulit berbicara mengenai suatu hal dalam suatu kelompok. (Bakry: 2017).

Dalam penelitian ini, data primer yang paling mungkin didapatkan adalah *interview* terhadap pihak yang relevan. *Interview* dilakukan terhadap para akademisi, pengamat, maupun para praktisi. Peneliti memfokuskan pada *interview* yang dilakukan terhadap akademisi di Universitas terkemuka yakni National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU), serta praktisi atau pemangku kepentingan di Singapura. Pertama adalah

wawancara dengan Sidek Sanif, mantan menteri Lingkungan Singapura. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali karakter Lee Kuan Yew mengingat sebagai seorang menteri tentunya Siek Sanif sangat mengenal Lee Kuan Yew. Kedua adalah wawancara dengan Roslan Giri. Roslan Giri adalah mantan pengurus MENDAKI, sebuah organisasi keagamaan yang terkemuka. Wawancara ini penting untuk melihat perspektif dari perwakilan organisasi keagamaan. Ketiga adalah wawancara dengan Alami Musa, seorang pengurus dari Majelis Ugama Islam Singapura. Alami Musa merupakan responden yang tepat untuk mewakili pihak yang berhubungan langsung dengan kebijakan Lee Kuan Yew. Selanjutnya untuk melihat perspektif politik luar negerinya, dipilih responden Ambassador Musahid Ali seorang duta besar yang mempunyai banyak pengalaman mengenai hubungan Singapura dengan dunia internasional. Dan Terakhir adalah wawancara dengan representasi Melayu Muslim yakni Syed Khaerudin Aljunied yang sekaligus merupakan akademisi yang banyak menggeluti tentang masalah-masalah terkait dengan Melayu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah segala bentuk data yang bukan berasal dari pengamatan langsung terhadap fenomena. Peneliti mendapatkan data tersebut bukan secara langsung olehnya, tetapi ia dapatkan dari pihak lain dalam berbagai bentuk dokumen. Di antaranya adalah data yang berupa buku atau jurnal yang

dikeluarkan (dipublikasikan oleh berbagai universitas atau lembaga akademik), berita-berita dalam media cetak ataupun elektronik, serta berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh seseorang atau suatu lembaga.

Data-data sekunder ini dapat ditemukan baik di berbagai perpustakaan di Singapura seperti *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS), *National University of Singapore*, *S. Rajaratnam School of International Studies* (NTU), maupun di tempat lain seperti perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Berbagai sumber berita diambil dari media elektronik seperti internet maupun media cetak.

Salah satu referensi terkait dengan teori ideosinkretik adalah penelaahan tentang biografi dari para pembuat kebijakan dalam hal ini adalah biografi Lee Kuan Yew. Biografi memuat tentang kisah hidup dan hal-hal yang melingkupinya sehingga peneliti dalam mengambil kaitan antara kebijakan dengan proses yang berlangsung pada lingkungan sosial dan politiknya.

1.7 Hipotesis

Dari permasalahan di atas ditarik hipotesis sebagai berikut:

Pemerintah Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompok Islam karena eksistensinya dinilai sangat strategis dan dapat mengancam integrasi bangsa. Dalam pandangan Lee Kuan Yew, meskipun jumlah kelompok Islam di Singapura kecil dan merupakan minoritas, tetapi mereka mendapatkan dukungan dari Malaysia maupun Indonesia.

Artinya, terdapat nilai Islam di lingkungan Singapura yang tidak dapat diabaikan oleh Lee Kuan Yew. Islam dipandang sebagai sebuah kekuatan yang sedang tumbuh yang menempatkan Singapura pada posisi yang sangat rentan. Kerentanan Singapura tidak sebatas karena faktor geografis saja, tetapi juga diakibatkan oleh identitas yang berbeda dengan lingkungan sekitar.

1.8 Kajian Literatur

Tulisan mendasar tentang Islam di Singapura dapat dilihat dari Hussin Muthalib yang berjudul *Melayu Singapura: Sebagai Kaum Minoritas dan Muslim di Dalam Sebuah Negeri Global*. Diawali dari penjabaran tentang identitas Melayu, buku ini memaparkan tentang Melayu (Islam) yang menampilkan wajah “masalah” bagi proses pembangunan kenegaraan dan kebangsaan di Singapura (Muthalib: 2015). Persoalan yang paling menonjol dari komunitas Muslim Melayu adalah masalah sosio-ekonomi di mana posisi mereka mengalami ketertinggalan, baik secara ekonomi, pendidikan, maupun sosial, seperti tingkat kesehatan dan aneka problem sosial lain yang cukup tinggi. Beberapa penyebabnya di antaranya adalah sindrom minoritas.

Mengutip pernyataan Tania Li, Muthalib menunjukkan salah satu kesenjangan antara kaum minoritas Melayu Muslim dengan etnis Cina dan India. Menurutnya, perbedaan dalam budaya kerja (etos kerja) orang Cina dan Melayu khususnya dalam bidang ekonomi dan perniagaan, telah menempatkan Kelompok masyarakat Melayu berada pada posisi yang selalu kekurangan, dan ini menguatkan stigma bahwa orang Melayu lebih inferior dibandingkan dengan Cina (Muthalib: 2015, 59).

Karya lain yang sangat populer adalah tulisan Lily Zubaidah Rahim yang dikenal sangat kritis. Rahim memperdalam inferioritas Etnis Muslim Melayu khususnya dalam bidang pendidikan. Rahim mengupas tentang marginalitas politik dan pendidikan dari komunitas masyarakat Melayu (Rahim: 1998). Posisi keterpinggiran secara politis dari etnis Melayu yang mayoritas Muslim ini sangat dipengaruhi oleh sistem pemilihan dan perwakilan yang menekankan pada jumlah pemilih untuk dapat mengusung wakil mereka.

Mengutip pendapat Turnbull, Rahim memaparkan bahwa sebenarnya pada periode awal atau era kolonialisme 1819, pulau ini dihuni oleh kira kira 1.000 orang Melayu atau sekitar 60%. Sementara etnis Cina sekitar 31% dan India sekitar 7%. Pada tahun 1834, komposisi ini berubah tajam ketika terjadi imigrasi tenaga kerja, sehingga komposisi Melayu dan Cina menjadi seimbang pada kisaran 41,8% dan 45,8% sisanya adalah etnis India. Selepas Kemerdekaan Singapura maka komposisi etnis Cina menjadi Mayoritas, sekitar 76% (lebih dari 2/3 penduduk) sementara Melayu pada angka 14% dan India 7.8%. Jumlah yang sedikit tentu saja merupakan kerugian secara politis bagi etnis Melayu. Hal ini dapat dilihat dalam komposisi Parlemen, sebagai contoh pada tahun 1991, Jumlah Kursi di Parlemen 81 kursi, tetapi jumlah jumlah anggota parlemen hanyalah 8 orang MP, atau sekitar 8%. Hal ini juga terlihat dalam keterwakilan etnis Melayu dalam Kabinet di mana pada tahun 1992 jumlah kabinet 14, Cina mendapatkan 11, India 2 dan Melayu 1. Hal yang demikian tentulah menguntungkan partai yang berkuasa yakni PAP (*People's Action Party*) yang didominasi oleh etnis Cina.

Hal kedua yang menyebabkan keterpinggiran etnis Melayu di Singapura adalah sistem pendidikan. Semenjak tahun 1979 kebijakan Pendidikan di Singapura cenderung mengadopsi sistem pendidikan ala Barat, sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Goh Report. Kebijakan-kebijakan yang lahir antara lain, regulasi tentang berdirinya sekolah-sekolah elit (khusus) yang otonom dan *monoethnic*. Hal ini memungkinkan berdirinya berbagai sekolah khusus yang menimbulkan disparitas dengan sekolah pada umumnya. Dengan biaya sekolah yang semakin tinggi, maka hanya mereka yang mempunyai tingkat ekonomi tertentu yang mampu memasuki sekolahan ini.

Kedua, adalah pemberlakuan *early-streaming* yang memungkinkan siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. *It would allow student to learn and develop at their own pace*. Keduanya ini menimbulkan kesenjangan pasca lulus sekolah, karena terutama menyangkut pada bidang kerja dan jaringan. *Elite schools tend to produce the privileged position of the social elite by preparing students for the most prestigious tertiary institution* (Rahim: 1998, 40).

Tulisan lain tentang problematika Islam di Singapura dikupas oleh Walid Jumlat Abdullah. Dalam disertasinya tentang *Religious Representation in Secular Singapore: A Study of MUIS and Pergas* ia menggambarkan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah yang sekuler terhadap komunitas masyarakat Islam. Pemerintah memilih pendekatan kooptasi baik secara formal maupun non formal (Abdullah: 2012). Kooptasi dilakukan dalam dua arah, yakni ada keinginan dari pemerintah untuk melakukan intervensi serta ada pihak yang dikooptasi juga memberikan izin. Dalam

kasus ini, Kooptasi formal dilakukan oleh pemerintah terhadap Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) sebuah organisasi bentukan pemerintah, serta Pergas, suatu organisasi non pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan. Menurut Abdullah, terhadap MUIS dilakukan kooptasi formal maupun non formal, sedangkan kooptasi informal dilakukan terhadap Pergas.

Hal ini merupakan penajaman dari kritik Li Ann Thio terhadap kinerja pemerintah Singapura dalam menghadapi masalah Islam dan Melayu. Menurut Li Ann Thio, ada tiga cara kerja pemerintah dalam menghadapi komunitas Muslim Melayu yakni Pragmatisme, Ko-optasi, dan Kerjasama (Thio: 2006, 2-3). Pragmatisme dalam pengelolaan agama di Singapura ditunjukkan oleh kebijakan pemerintah dengan mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler. Dengan demikian Pemerintah tidak bertanggung jawab secara konstitusional akan keberlangsungan kehidupan keagamaan. Sekularisme di Singapura tentunya berbeda dengan sekularisme di negara Komunis yang melarang segala bentuk ritual agama, sekularisme di Singapura tetap menjamin kebebasan warga negara untuk memilih agama dan menjalankan peribadatan agama tersebut.

Model kebijakan kedua adalah dengan kooptasi, yakni melakukan intervensi (*legal*) dalam urusan agama. Di antaranya adalah dengan pembentukan Majelis Ulama Islam Singapura sebuah lembaga yang mengurus persoalan Zakat, Waqof Haji, Pembangunan dan Pemeliharaan Masjid, Administrator Madrasah, Fatwa dan Fakir Miskin, di mana pengurusnya adalah orang-orang pemerintah. Dan model terakhir adalah kooperasi yakni pemerintah bekerja sama

dengan berbagai kelompok agama untuk melaksanakan dan menyosialisasikan berbagai program pemerintah.

Dari kacamata kebijakan luar negeri, terdapat berbagai tulisan yang menarik. Pertama adalah tulisan dari Ganesan (Ganesan: 2005). Ganesan memaparkan peranan realis dalam menganalisa politik luar negeri Singapura. Realisme ini muncul sebagai fungsi dari kemerdekaannya yang tidak terlalu disukai oleh Indonesia dan Malaysia. Upaya mempertahankan dirinya menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negerinya di tengah minimnya modalitas pembangunan seperti kuantitas sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Kebijakan luar negeri Singapura yang mampu mengubahnya dari negara kecil dan rentan menjadi negara yang makmur dan kokoh pastilah merupakan produk terencana dari pemerintah yang dikuasai Partai Tindakan Rakyat (PAP). Ada dua komponen dalam hal ini, yakni dukungan stabilitas politik dalam negeri dan kredibilitas kepemimpinan dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya, dan mencapai kemakmuran ekonomi.

Ganesan menekankan pada pentingnya melihat kekurangan Singapura dalam masalah geopolitik. Ia mengutip pernyataan salah seorang menteri luar negeri Wong Kan Seng. *“The vulnerability of small states is a fact of life. Singapore's tence is today widely recognized. But to answer our basic allow tests to our sovereignty and internal affairs, even when go unchallenged. Even today we have had occasionally to leave us alone to be our selves”*. (Ganesan: 1992)

Stabilitas politik dalam negeri menjadi prioritas utama pemerintah, karena tanpa hal ini sulit bagi Singapura untuk

membangun dirinya. Partai Tindakan Rakyat mengendalikan pemerintahan dengan selalu memenangkan secara mutlak pada setiap pemilu. Realisme ini juga diimplementasikan dalam kebijakan memperkuat sisi pertahanan dalam menjaga kedaulatan. Terkepung oleh Indonesia dan Malaysia, Singapura berusaha menjalin kerja sama dengan pihak luar untuk memperkuat sistem pertahanannya dengan membeli peralatan militer yang canggih dan memobilisasi semua elemen masyarakat untuk terlibat dalam sektor pertahanan yakni dengan mengeluarkan kebijakan wajib militer (conscription) atau dalam istilah lain disebut sebagai *citizen army*.

Kajian lain datang dari Balaji Sadavisan yang memulai kajiannya dengan mendeskripsikan tentang kerentanan Singapurasebagai sebuah negara kecil yang miskin sumberdaya alam. Satu satunya kekayaan yang dimiliki oleh Singapura adalah sumberdaya manusia. Sebagai sebuah negara kecil maka dua prinsip besar yang dianut oleh Singapura adalah menjadi teman yang saling menguntungkan dan menjajadi warga negara dunia yang baik,(Sadavisan: 2007). Kerentanan ini mendorong Singapura untuk mendukung prinsip ASEAN yang menghindari konflik antar anggotanya yang tentunya akan membahayakan posisi Singapura.

Pada aras yang sama, Lee Bon Hiok menengarai tentang hambatan hambatan dalam politik luar negeri Singapura. Menurutnya, ukuran (size) suatu negara dan jumlah penduduknya selalu menjadi faktor penentu dalam kebijakan luar negeri. Negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar mempunyai kecenderungan untuk berani terlibat dalam

konflik-konflik internasional. *Thus, it is suggested that the great power are mor war prone than small states. Moreover, large state with over 30 million population seem to initiate more acts of conflict, aside from the use of force, than small states, and small states are more likely to use international organizations as arenas to pursue their objective.*(Hiok : 1982)

Hiok juga menunjukkan implementasi dari argumennya itu dengan menunjukkan garis kebijakan luar negeri sebagaimana dinyatakan oleh S. Dhanabalan. *More recently, S. Dhanabalan, Singapore's Foreign Minister, has identified the main precepts of the country's foreign policy. First, "we will be friends with all who wish to be friends."12 Second, "we will trade with any state for mutual benefit, regardless of ideology or system of gov- ernment." Third, "we will remain non-aligned with regard to the rival- ries of great-power blocs." Lastly, "we will cooperate closely with ASEAN members to achieve regional cohesion, stability and progress."* (Hiok: 1982). Hal tersebut menunjukkan sikap moderate dari sebuah negara kecil.

Sementara itu, Michael Leifer (2000) menggambarkan bagaimana Singapura berkelit dari berbagai situasi yang tidak menguntungkan khususnya pasca kemerdekaan tahun 1965 yang tidak diraihnya dengan cuma-cuma. Menurutnya, proses pembuatan keputusan luar negeri bukan sesuatu yang kompleks karena sangat ditentukan oleh tiga serangkai tokoh yang *outstanding* yakni Perdana Menteri Lee Kuan Yew, Menteri Luar Negeri Sinathamby Rajaratnam, dan Menteri Pertahanan Goh Keng Swee.

Sesaat setelah kemerdekaan, dengan kemampuan dan daya analisisnya, Lee Kuan Yew telah merancang dan mengendalikan kebijakan luar negeri sebagaimana negara-negara modern yang dengan penuh perhitungan dan bersandar pada rasionalitas, mengingat Singapura berada di daerah Jantung antara Indonesia dan Malaysia sehingga dapat memainkan peran strategis, tetapi jika terlalu banyak bermain maka Singapura justru akan mudah terkubur.

Dalam strateginya, Singapura tidak terlalu menekankan pada hubungan multilateral, sebagaimana negara-negara yang lain, kecuali kepada FPDA dan ASEAN sebagai sarana diplomasi dengan tetangga. FPDA dapat membantu Singapura dalam rangka pertahanan serta menciptakan *deterrence* terhadap negara-negara tetangga. Sebaliknya, Singapura justru lebih mengedepankan kerja sama bilateral yang lebih menguntungkan terutama dengan Amerika Serikat dan Israel.

Jika kita cermati, maka kajian-kajian tersebut menempatkan Singapura sebagai sebuah negara kecil yang amat rentan, utamanya adalah karena persoalan geopolitik. Luas wilayah Singapura yang sangat kecil dan minimnya sumber daya alam, menjadikan Singapura seolah mempunyai daya tawar yang rendah di hadapan bangsa lain. Kebijakan-kebijakan Singapura di bawah Lee Kuan Yew juga menunjukkan dominannya perspektif Realis baik dalam wacana maupun dalam dimensi praksis dengan fokus utama adalah pada peran negara sebagai pengampu kekuasaan tertinggi.

Tulisan ini bermaksud menawarkan perspektif lain dalam memahami Kebijakan politik di Singapura. Perspektif yang ditawarkan adalah konstruktivisme yang mengelaborasi

peranan identitas dalam pembuatan kebijakan, sehingga dapat ditemukan alternatif jawaban bahwa rentanitas Singapura bukan semata karena persoalan geopolitik, tetapi juga dalam persoalan identitas. Sebagaimana disinggung pada bagian awal, Etnis Cina menjadi kelompok yang paling besar di Singapura sementara di Indonesia dan Malaysia, situasi berkebalikan. Etnis Cina menjadi kelompok minoritas. Dengan demikian dapat dikatakan terjadi double minority, dimana Etnis Cina menjadi kelompok mayoritas di Singapura, sekaligus menjadi kelompok minoritas di Asia tenggara.

1.9 Jangkauan Penelitian

Membatasi penelitian dapat berupa batasan rentang waktu, era kepemimpinan seseorang, ataupun batasan bidang kajian tertentu. Pembatasan dilakukan untuk menjamin agar deskripsi dan analisa atas suatu kasus tidak melebar dan kehilangan fokus. Dalam penelitian ini, jangkauan penelitian akan difokuskan pada pijakan sejarah di mana terjadi pergeseran atau transisi di Singapura dari Inggris, Malaysia Hingga Merdeka tahun 1965. Pada kurun waktu inilah, Singapura menentukan identitasnya sebagai negara yang merdeka, sekaligus menentukan format keberpihakan luar negerinya.

Peranan Lee Kuan Yew telah menonjol semenjak Pemerintah Kolonial Inggris memberikan status sebagai daerah administrasi yang terpisah bagi Singapura tahun 1946. Beberapa peristiwa penting mulai terjadi secara simultan sejak status ini. Dalam kepemimpinan Lee Kuan Yew, sentral pembuatan keputusan berada di tangannya, hingga ia mengundurkan diri pada tahun 1990 untuk digantikan oleh

Goh Chok Tong. Oleh karenanya penelitian ini membatasi range waktu sedari 1946 hingga 1990. Alasannya adalah pada tahun tersebut Lee Kuan Yew telah mulai berkecimpung dalam dunia politik. Adapun era pasca Lee Kuan Yew, kebijakan-kebijakan penerusnya seperti Goh Chok Tong dan Lee Shien Loong mempunyai pola yang hampir sama dengan Lee Kuan Yew.

1.10 Rencana Sistematika Penulisan

Laporan akhir dari penelitian ini dirancang sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan. Bab ini berisi tentang Latar belakang munculnya masalah mengenai Pengaruh Islam dalam Politik Luar Negeri Singapura, rumusan permasalahan , kerangka teoritik dan tinjauan pustaka. Bab ini juga memaparkan tentang Tujuan penulisan, signifikansi topik, metode penelitian serta kelengkapan sebuah tulisan disertasi

Bab 2. Akan berisi tentang dinamika politik Singapura secara umum. Pembahasan ini dinilai penting untuk menunjukkan gambaran dasar tentang kebijakan politik Singapura dan kebijakan luar negerinya. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan luar negeri Singapura terhadap Amerika Serikat dan sekitarnya.

Bab 3, Membicarakan tentang eksistensi Islam di Singapura dari perspektif sejarah, karakteristik, berbagai problematika Islam, keterwakilan Islam dalam politik serta gerakan gerakan Islam yang ada di Singapura. Bagian ini akan mendeskripsikan tentang posisi Islam dalam ranah politik di Singapura yang berada pada posisi minoritas dengan stigma

yang negative dan terbelakang dari sisi politik, pendidikan dan ekonomi.

Bab 4. Bab ini akan membicarakan secara khusus tentang Lee Kuan Yew. Hal ini penting mengingat Lee Kuan Yew adalah tokoh terpenting dalam pembuatan keputusan di Singapura mengingat Lee Kuan Yew adalah pendiri Singapura dan memerintah Singapura untuk waktu yang sangat lama, hampir 30 tahun. Pemaparan ini penting karena berdasarkan teori ideosinkretisme, pengambilan keputusan suatu negara didasarkan pada citra para pembuat keputusan terhadap lingkungan sekitar. Citra tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang dapat berupa keluarga, pendidikan dan pengalaman sejarah. Oleh karenanya berbagai fenomena politik yang melingkupi kehidupan Lee Kuan Yew menjadi faktor penting seperti peristiwa kerusuhan rasial, tekanan dari sayap kanan Malaysia, konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia yang merembet pada hubungannya dengan Singapura, serta stigmatisasi Islam.

Bab 5. Berisi Tentang Analisa peranan Islam dalam Politik di Singapura. Pertama-tama akan dibahas tentang Lee Kuan Yew sebagai arsitek politik dan pembangunan Singapura, lalu menjelaskan peran ideosinkretik Lee Kuan Yew, yang meliputi pengalaman sejarahnya. Dalam bab ini juga akan dipaparkan tentang kebijakan kebijakan yang bersifat akomodatif Singapura terhadap eksistensi Islam dan negara tetangganya yang mayoritasnya berpenduduk Islam. Bagian ini juga akan membicarakan tentang bagaimana Islam itu dipersepsikan sebagai sebuah ancaman yang mempunyai daya tekan dalam proses pembuatan kebijakan.

Bab 6 akan berisi kesimpulan atas pemaparan bagian-bagian sebelumnya serta rekomendasi akan penelitian selanjutnya tentang topik yang hampir sama.